

# DISONANSI MEMORI MONUMEN KOLONIAL: STUDI KASUS TUGU CORNELIS CHASTELEIN, DEPOK, JAWA BARAT

Alqiz Lukman

*Pusat Penelitian Arkeologi Nasional,  
Jalan Raya Condet Pejaten, No. 04, Jakarta Selatan, Indonesia  
alqiz.lukman@kemdikbud.go.id*

**Abstract.** *Dissonant Memories of Colonial Monument: A Case Study of Cornelis Chastelein Monument, Depok Jawa Barat.* Material remains from the colonial period are still marginalized from the development of archaeological research in Indonesia. In contrast, monuments, sites, or other material remains from this period are memory repository of identity struggle, development discourse, and social pattern that shaped the modern life of Indonesian society. This article examined how the Old Depok society commemorates Cornelis Chastelein, a VOC high-ranker, who liberated their ancestors and introduced Christianity to them in the form of monument. Contrary to the Old Depok society, the rebuilding of the monument of Cornelis Chastelein was opposed by the Depok government because it is considered as an act to bring back memories of colonialism. This study is using an oral history approach by interviewing Old Depok people, academics, and historical observers as key informants. The concept of dissonant memory is used to analyze interactions and negotiations in the case of the monument of Chastelein conflict. Based on this research, it is known that material remains from the colonial period have diverse values for each element of society and creates new social dynamics in the present. This article argues that archeology is not only useful for reconstructing past activity but it also can reflect present life to construct a better future.

**Keywords:** *Colonial Heritage, Decolonization, Depok, Dissonant Memory, Monument of Cornelis Chastelein.*

**Abstrak.** Tinggalan materi yang berasal dari masa kolonial masih termatjinalkan dari perhatian perkembangan penelitian arkeologi di Indonesia. Perlu diketahui bahwa monumen, situs, atau tinggalan materi lainnya yang berasal dari masa itu menyimpan memori tentang perjuangan identitas, penentuan arah pembangunan, dan pola kehidupan sosial yang membentuk karakter masyarakat Indonesia masa kini. Artikel ini membahas bagaimana masyarakat Depok Lama mengabadikan memori sosok Cornelis Chastelein, salah seorang petinggi VOC, yang telah memerdekakan leluhur mereka dari perbudakan dan memperkenalkan ajaran agama Kristen dalam wujud sebuah monumen. Di sisi lain, pembangunan kembali Tugu Cornelis Chastelein pada 2014 mendapatkan pertentangan dari Pemerintah Kota Depok karena dianggap membawa kembali ingatan terhadap kejamnya penjajahan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah lisan dengan mewawancarai warga masyarakat Depok Lama, akademisi, dan pemerhati sejarah sebagai informan utama. Konsep disonansi memori dipakai untuk menganalisis interaksi dan negosiasi yang tercipta dalam kasus perseteruan pembangunan Tugu Cornelis Chastelein. Patut diketahui bahwa tinggalan budaya materi dari masa kolonial memiliki nilai yang beragam bagi setiap elemen masyarakat dan dapat menciptakan dinamika sosial yang baru pada masa kini. Artikel ini berargumen bahwa ilmu arkeologi tidak hanya berguna untuk keperluan merekonstruksi kehidupan masa lalu, tetapi juga merefleksikan kehidupan masa kini untuk mengonstruksi kehidupan yang akan datang.

**Kata Kunci:** Depok, Dekolonisasi, Disonansi Memori, Tugu Cornelis Chastelein, Warisan Budaya Kolonial.

## 1. Pendahuluan

Pembahasan mengenai tema poskolonial tampaknya masih dihindari dalam penelitian

arkeologi di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh poskolonial arkeologi berkaitan erat dengan politik praktis yang berimplikasi kepada data

Naskah diterima tanggal 06 Februari 2020, diperiksa tanggal 24 Februari 2020, dan disetujui tanggal 04 Maret 2020

arkeologi dapat digunakan untuk dijadikan dasar argumentasi membenarkan tindakan suatu pihak atau kaum dan menimbulkan keberpihakan (Gosden 2012, 252). Oleh karena itu, kajian poskolonial dalam arkeologi memiliki subjektivitas yang bertolak belakang dengan kajian arkeologi yang menggunakan pendekatan dari ilmu keras bahwa kebudayaan dapat digeneralisasi. Kajian poskolonial di dalam ilmu arkeologi sealiran dengan kritik pascaprosesual, yang menyatakan bahwa kebudayaan tidak bersifat universal dan makna yang dihasilkan dalam penelitian bisa beragam bergantung pada sudut pandang penelitiannya. Dalam konteks kolonial selalu ada asosiasi dengan dominasi, relasi kuasa, dan resistensi yang menciptakan banyak perspektif dalam pengkajian tinggalan budaya kolonial.

Poskolonial arkeologi dapat diartikan sebagai cabang dari disiplin ilmu arkeologi yang digunakan oleh masyarakat yang terjajah atau teralienasi sebagai alat untuk menuliskan sendiri historiografi daerahnya (Gosden 2012; Liebmann and Rizvi 2008; Lilley 2000). Fokus perhatian poskolonial arkeologi adalah untuk mengangkat riwayat suatu kaum atau pihak yang teralienasi dan termarginalkan pada saat penjajahan berlangsung (Meskell 2012, 235). Sudut pandang poskolonial di dalam artikel ini digunakan untuk melihat bagaimana interpretasi terhadap setiap elemen masyarakat dengan beragam perspektif tinggalan kebudayaan kolonial menghasilkan dinamika baru pada kehidupan sosial masa kini. Hal ini berangkat pada kenyataan bahwa pemaknaan dan rekonstruksi kebudayaan masa lalu dari tinggalan materi tidak bersifat tunggal. Disiplin ilmu arkeologi ini memiliki peran untuk mengamati perkembangan makna tinggalan materi yang digunakan untuk kepentingan politik, sosial, dan ekonomi pada saat ini (Mason and Baveystock 2009, 16; Tanudirjo 2019, 11).

Indonesia, sebagai negara yang pernah dijajah oleh berbagai negara sejak abad ke-17 hingga pertengahan abad ke-20, tentunya memiliki banyak tinggalan materi dari hegemoni

kolonialisme. Salah satu tinggalan materi tersebut adalah Tugu Cornelis Chastelein yang berada di daerah Depok Lama, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Cornelis Chastelein adalah seorang pejabat tinggi *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) dengan status anggota *Raad van Indie* yang memiliki tanah partikelir di daerah Depok pada abad ke-17. Dalam menggarap lahannya di Depok, ia dibantu oleh para budaknya yang berasal dari Bali, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa, dan Pulau Rote (Lukman, Assilmi, and Imandiharja 2019). Chastelein memberikan pendidikan baca tulis, mengajarkan bahasa Belanda, serta memperkenalkan agama Kristen kepada para budaknya. Perlakuan Chastelein ini berbeda dengan tuan tanah lainnya pada masa itu, yang hanya berfokus pada keuntungan ekonomi tanpa memperhatikan kesejahteraan hidup budaknya. Pada akhir hayatnya, Chastelein memerdekakan para budaknya dan memberikan seluruh lahannya untuk mereka kelola (Wulan *et al.* 2018, 15–16). Budak-budak Cornelis Chastelein dan keturunannya pada saat ini dikenal sebagai warga Depok Lama. Dua ratus tahun semenjak kematian Chastelein, pada 1914 warga Depok Lama mendirikan sebuah tugu di depan kantor pemerintahan Depok (*Gementee Depok*) sebagai bentuk terima kasih atas jasanya (Gambar 1).

Setelah nasionalisasi Depok pada 1952, bangunan publik di daerah Depok Lama mengalami perubahan untuk kepentingan pembangunan dan pengembangan daerah (Lukman and Nugroho 2018, 4–5; Irsyam 2017, 9). Berdasarkan laporan warga Depok Lama, Tugu Cornelis Chastelein juga turut dihancurkan pada masa ini. Tidak ada catatan khusus dan informasi yang valid mengenai penghancuran Tugu Cornelis Chastelein. Akan tetapi, dapat dipastikan bahwa sosok Cornelis Chastelein yang dianggap sebagai pahlawan di Depok lenyap dari permukaan seiring dengan hilangnya tugu tersebut.

Sejumlah warga Depok Lama yang bernaung dalam Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein (YLCC) pada 2014 melakukan pembangunan



**Gambar 1.** Tugu Cornelis Chastelein (Sumber: Koleksi YLCC)

kembali Tugu Cornelis Chastelein dalam rangka peringatan 300 tahun kematian Chastelein. Pembangunan itu mendapatkan pelarangan dari Pemerintah Kota Depok. Berdasarkan pemberitaan di media massa, Pemerintah Kota Depok melarang pembangunan Tugu Cornelis Chastelein karena tugu itu dapat membangkitkan kembali memori penjajahan (Tanjung 2014; Ucu 2014). Lebih lanjut dijelaskan bahwa Cornelis Chastelein bukanlah seorang pejuang yang layak diberikan penghormatan demikian.

Tugu Cornelis Chastelein, sebagai warisan budaya kolonial, memiliki memori yang berubah dari waktu ke waktu dan memiliki makna yang berbeda bagi individu, kelompok, ataupun institusi. Hal itu menimbulkan kontestasi sebagai proses dari disonansi memori dari sebuah tinggalan materi. Selanjutnya, artikel ini membahas bagaimana proses negosiasi memori dari Tugu Cornelis Chastelein, yang dalam hal ini warga Depok Lama memperjuangkan kisah sejarahnya yang telah menjadi bagian dari identitas dan jati diri mereka, tetapi disisi lain Pemerintah Kota Depok mengakomodasi tuntutan masyarakatnya.

## **2. Metode**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sejarah lisan (*oral history*). Pendekatan ini menggunakan hasil wawancara sebagai data utama. Wawancara dilakukan terhadap sekelompok masyarakat yang hidup dalam batas geografis tertentu dan/atau berbagi identitas sosial tentang suatu kejadian, bangunan, lansekap, ataupun lingkungan masa lalu yang berada di area masyarakat tersebut (Shopes 2002, 588). Sejarah lisan dalam arkeologi penting untuk memberikan gambaran umum dari perspektif masyarakat tersebut dalam memahami peristiwa pada masa lalu (Moshenska 2007, 91–92; Whiteley 2002, 405–6). Penggunaan sejarah lisan dalam memberikan pemahaman tinggalan arkeologi umum dilakukan terhadap material dari perang dunia, penjajahan, etnoarkeologi, dan/atau tema lain yang masih memiliki memori kolektif yang kuat dalam kehidupan masyarakat (Beck and Somerville 2005; Lukman, Assilmi, and Imandiharja 2019; Metcalfe 2011; Moshenska 2007). Dengan demikian, penggunaan pendekatan sejarah lisan

dalam penelitian ini guna memahami makna Tugu Cornelis Chastelein bagi masyarakat kontemporer di Kota Depok.

Pendekatan sejarah lisan tentu memiliki kekurangan, yaitu adanya bias personal terkait dengan informasi yang diberikan oleh informan. Untuk menutupi kekurangan itu, diperlukan informan tambahan yang berasal dari latar belakang yang sama dan memahami kejadian tersebut (Levine and Meihy 2001). Dalam penelitian ini, penulis melakukan interview terhadap empat warga Depok Lama yang terdiri atas satu orang penulis buku tentang sejarah Depok Lama, dua orang dari bidang sejarah dari YLCC (ketua dan anggota), dan satu orang anggota YLCC, yaitu salah satu pemrakarsa pembangunan ulang Tugu Cornelis Chastelein. Untuk memperdalam konteks sejarah, penulis juga mewawancarai tiga orang akademisi dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia yang pernah melakukan penelitian mendalam mengenai sejarah dan masyarakat Depok Lama. Satu orang pemerhati sejarah yang aktif dalam menyuarakan cagar budaya di Kota Depok juga dijadikan informan. Akan tetapi, disayangkan tidak ada wakil dari Pemerintah Kota Depok yang bersedia untuk diwawancarai terkait dengan permasalahan pembangunan Tugu Cornelis Chastelein. Semua data dan informasi dari para narasumber dirahasiakan demi alasan keamanan.

Sistem semi terstruktur digunakan dalam wawancara dengan mengajukan pertanyaan terbuka kepada narasumber, lalu diikuti pertanyaan tambahan berdasarkan jawaban mereka. Tema atau topik pertanyaan adalah seputar sejarah Depok Lama, peran Cornelis Chastelein, pembangunan Tugu Cornelis Chastelein, dan makna kehadiran Cornelis Chastelein bagi warga Depok Lama. Wawancara tatap muka dan perekaman audio dilakukan di tempat yang dikehendaki oleh narasumber.

Hasil wawancara menjadi dasar untuk menganalisis disonansi yang terjadi pada Tugu Cornelis Chastelein dengan menggunakan konsep

disonansi memori. Studi literatur dilakukan untuk penyusunan latar belakang penelitian dan kerangka teori untuk analisis data. Penelusuran media massa terkait pemberitaan pembangunan Tugu Cornelis Chastelein juga dilakukan untuk memperkaya data mengenai persepsi masyarakat. Observasi lapangan dilakukan untuk memvalidasi data dalam penulisan artikel ini.

### **3. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **3.1 Dekolonisasi, Monumen Kolonial, dan Disonansi Memori**

Bagi negara yang memerdekakan diri dari penjajahan, masa kolonial merupakan catatan kelam yang akan dihilangkan dari historiografi negara tersebut. Indonesia, sebagai negara yang telah memerdekakan diri dari segala bentuk penjajahan, ditandai dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, juga melakukan penulisan narasi baru untuk sejarah nasional. Para sejarawan, arkeolog, budayawan, dan para ilmuwan lainnya berusaha menghapus memori kolonial dengan menampilkan kedigdayaan kerajaan lokal sebelum masa penjajahan di Indonesia (Lukman and Nugroho 2018, 2; Nordholt 2004, 5). Hal itu terbukti pada kongres sejarah pertama pada tahun 1957 bahwa wilayah kedaulatan Indonesia sudah terbentuk sejak masa keemasan Kerajaan Majapahit meskipun secara fakta sejarah menyatakan bahwa Republik Indonesia dibentuk dari bekas wilayah koloni Belanda di Asia Tenggara (Antlöv 2005, 45; Yamin 2008, 18).

Penghapusan jejak kolonial juga terjadi pada tinggalkan materi dari masa kolonial yang terletak di area publik. Di Jakarta, Monumen Perang Aceh yang terletak di Taman Wilhelmina dan Gerbang Amsterdam, yang merupakan sisa Benteng Batavia, dihancurkan pada tahun 1950 hingga 1960-an (Gambar 2). Monumen yang menjadi simbol warisan kolonial digantikan dengan imaji baru yang mewakili keberagaman etnik, agama, dan budaya di Indonesia (Candiwidoro 2017, 60). Pembangunan Monumen Nasional dan bangunan

ibadah dari lima agama di sekitarnya di atas koningsplein atau alun-alun kerajaan merupakan salah satu contoh pembentukan identitas nasional baru sesuai dengan pemikiran para pendiri bangsa (Roosmalen 2013).



**Gambar 2.** Penurunan Patung pada Monumen Perang Aceh (Sumber: KITLV)

Aksi pelenyapan jejak kolonial yang dijabarkan sebelumnya merupakan aksi dekolonisasi. Dekolonisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh penduduk asli suatu wilayah untuk melakukan dewesternisasi dan menghapuskan noda penjajahan dalam rangka pembangunan daerah mereka sendiri (Gaztambide-fernández 2014, 197; Mignolo 2002). Aksi ini melibatkan proses pergantian intelektualitas dan nilai-nilai dari bangsa asing ke norma lokal dalam segala aspek yang bersifat pemikiran dan material (Lukman and Nugroho 2018).

Proses dekolonisasi pada monumen kolonial terjadi karena monumen merupakan representasi dari suatu budaya, yang konten dan interpretasi yang diberikan selalu berubah bergantung pada kebutuhan individu, golongan,

ataupun institusi pada saat itu (Johnson 2014, 584; Smith 2006, 3). Memori yang melekat pada sebuah monumen yang berada di tempat publik selalu berubah dari generasi dan generasi sehingga memungkinkan fokus memori yang dimiliki monumen tersebut sudah tidak relevan bagi masyarakatnya (Johnston and Ripmeester 2007). Dalam konteks monumen kolonial yang berdiri setelah masa kemerdekaan menjadi memori yang harus disingkirkan karena nilai rezim kolonial masih melekat pada monumen tersebut.

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan rezim politik, dan keterbukaan informasi, masyarakat di Indonesia mulai mengutarakan pendapat dan membawa kepentingannya ke khalayak umum. Kesetaraan, emansipasi, dan keterbukaan menjadi gagasan baru yang digunakan pada abad ke-21 ini. Golongan atau kaum yang selama ini diam dan termarginalkan mulai menyuarakan pendapat dan suaranya untuk memperjuangkan hak serta pengakuan akan identitasnya. Hal ini juga terjadi pada warisan budaya kolonial. Warisan budaya yang sebelumnya dianggap “tidak resmi” dan “tidak diinginkan” dipublikasikan oleh masyarakat pendukungnya guna mendapatkan perhatian masyarakat luas dan diakui secara legal. Hal ini berakibat pada terciptanya kontroversi dan disonansi terhadap warisan budaya (Macdonald 2009, 94–95).

Konsep disonansi memori pada warisan budaya pertama kali diperkenalkan oleh Tunbridge dan Ashworth (1996) yang melakukan pembahasan mengenai tinggalkan masa lalu yang menciptakan konflik pada masa kini. Mereka mendefinisikan disonansi memori pada warisan budaya sebagai kondisi yang memperlihatkan adanya ketidaksesuaian atau ketidaksepakatan makna terhadap warisan budaya (Tunbridge and Ashworth 1996, 19). Warisan budaya memiliki disonansi karena nilai yang terkandung di dalamnya selalu memiliki persaingan antara nilai universal dan nilai tertentu serta pemaknaan kolektif dan

individu (Ashworth and Graham 2005; Mason and Baveystock 2009, 16). Pemberian makna secara resmi suatu institusi akan terus tarik-menarik dengan interpretasi individu dari relasi identitasnya dengan masa lalu (Dicks 2003, 126). Proses disonansi memori ini dapat dipahami sebagai proses dan mekanisme warisan budaya memiliki nilai yang dinegosiasi secara bersama (Smith 2006, 308).

### 3.2 Cornelis Chastelein dalam Pembangunan Depok

Cornelis Chastelein adalah seorang saudagar dari Huguenots yang tiba di Batavia pada tanggal 16 Agustus 1674. Namanya mencuat saat Chastelein memperjuangkan kestabilan ekologi dan lingkungan ketika terjadi alih fungsi lahan secara masif untuk menjadi industri gula di Batavia pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18 (Chastelein 1876). Pemikirannya dalam pengelolaan lahan yang visioner membawa Chastelein ke puncak kariernya sebagai anggota *Raad van Indie* yang merupakan dewan penasihat Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Kanumoyoso 2011, 70).

Sebagai seorang pejabat tinggi di VOC, Chastelein memiliki lahan luas di area luar kastil Batavia (*Ommenlanden*) yang meliputi daerah di Noordwijk (saat ini daerah Juanda), Lapangan Banteng, Weltevreden (saat ini daerah Senen), Seringsing (saat ini daerah sekitar Lenteng Agung), dan Depok (Irsyam 2017; Jonathans 2011). Dalam surat wasiatnya diketahui bahwa tanah yang ia miliki di Depok membentang dari Sungai Ciliwung, Sungai Krukut, hingga Sungai Pasanggrahan, yang diperkirakan seluas 42.378,75 m<sup>2</sup> (Chastelein 1900). Kepemilikan tanah Depok ini berstatus partikelir, yang pengelolaan dan administrasi lahan tersebut diserahkan kepada pemilik lahan (Niemeijer 2012, 138). Dalam menggarap lahannya di Depok, ia dibantu oleh 150 budak yang berasal dari Bali, Makassar, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Jawa, dan Pulau Rote.

Berdasarkan hasil wawancara, Chastelein memberikan kebebasan dan memperlakukan budaknya sebagaimana layaknya manusia. Berbeda dengan tuan tanah lainnya, yang ketika itu hanya mengambil keuntungan dengan cara memeras tenaga para budaknya, Chastelein mengajarkan ilmu pengetahuan dasar, bahasa Belanda, dan berhitung kepada para budaknya. Ia juga mengajarkan tata krama dan norma kehidupan melalui ajaran agama Kristen. Dalam memperkuat iman para budaknya, Chastelein membangun sebuah gereja dan rumah pastori di daerah Depok Lama yang saat ini dikenal dengan nama *Gereja Immanuel* dan terletak di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok (Gambar 3).



Gambar 3. Lukisan L.J. van Rhijn yang menggambarkan gereja dan rumah pastori di Depok tahun 1847 (Kwisthout 2018, 88)

Pernyataan para narasumber diperkuat dengan temuan arsip dengan judul "*Invallende Gedagten*" yang berisi sindiran Chastelein terhadap gaya pemerintahan pada saat itu (Chastelein 1855). Bagi Chastelein, daerah koloni tidak akan bertahan tanpa dukungan dari masyarakat lokal. Kesenjangan sosial antara masyarakat Eropa dan lokal akan menimbulkan perlawanan yang dapat menyebabkan ketidakstabilan di daerah koloni (Batavia). Chastelein mengusulkan agar tenaga kerja pada lahan koloni diberi kebebasan untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya dalam menciptakan situasi yang ideal pengembangan daerah koloni. Wilayah Depok dijadikannya sebagai wilayah percontohan terkait dengan pengelolaan daerah koloni.

Chastelein juga memberikan landasan mengenai pengelolaan lahan yang demokratis. Hal itu bertolak dari perhatiannya bahwa penguasa lokal melakukan korupsi dan turut menindas masyarakat lokal. Untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan oleh para budaknya, Chastelein memerintahkan para budaknya untuk memilih pimpinan bagi kelompoknya dalam masa waktu tertentu (Kanumoyoso 2011, 88). Pimpinan para budak ini mengatur pembagian tugas dan menangani permasalahan yang dialami oleh para budak Chastelein. Dalam surat wasiatnya dijelaskan bahwa semasa Chastelein menjadi tuan tanah di Depok, ia dibantu oleh Jarong dari Bali sebagai pimpinan para budak yang dibantu oleh enam budak lainnya (Chastelein 1900). Lebih lanjut, dijelaskan bahwa apabila pimpinan para budak tersebut meninggal, penggantinya akan dipilih melalui musyawarah para budak.

Perintah Chastelein untuk menjalankan pengelolaan lahan di Depok dengan demokratis terus dijalankan oleh para budak dan keturunannya. Hal ini terlihat pada *Reglement van het Depok* yang merupakan aturan Depok ketika menjadi daerah otonomi pada masa Hindia Belanda tahun 1871 (Jonathans 2011). Peraturan ini menjelaskan bahwa Depok dipimpin oleh seorang presiden yang dibantu oleh sembilan asisten, polisi, dan kumitir

dalam menjalankan pemerintahannya. Hingga nasionalisasi Depok pada 1952, Depok telah dipimpin oleh lima orang presiden (Irsyam 2017, 44). Menurut hasil wawancara, pemilihan Presiden Depok dilakukan secara aklamasi dalam musyawarah yang diikuti oleh seluruh keturunan budak Chastelein. Musyawarah ini dilakukan di Gedung Eben Haezer yang pada saat ini menjadi bagian dari SMA Kasih yang terletak di Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok (Gambar 4).

Berdasarkan informasi dari narasumber, Chastelein juga sangat memperhatikan keseimbangan ekosistem lahannya di Depok. Hal ini disebabkan oleh penggundulan hutan secara masif yang terjadi di Batavia pada akhir abad ke-17 ketika gula menjadi komoditas primadona di pasar perdagangan Eropa. Pembukaan lahan dilakukan untuk persiapan lahan tebu dan kayu hasil pembabatan hutan digunakan untuk konstruksi bangunan dan bahan bakar. Penebangan pohon secara besar-besaran membuat daerah penadah hujan berkurang dan menimbulkan banjir di daerah Kastil Batavia setiap musim hujan. Akademisi yang menjadi narasumber penulis menjelaskan bahwa musibah banjir merupakan hal yang sering menjadi pembahasan di rapat *Raad van Indie* pada masa Chastelein menjabat. Menurut Chastelein, penyebab banjir tersebut karena tidak adanya tempat reservoir air di daerah



**Gambar 4.** Gedung Eben Haezer yang menjadi tempat pemilihan Presiden Depok (Sumber: Lukman 2018)



**Gambar 5.** Zona preservasi hutan peninggalan Chastelein yang masih tersisa (Sumber: Lukman 2018)

hulu sungai Ciliwung yang menyebabkan luapan air besar di Kastil Batavia (Kanumoyoso 2011, 39). Chastelein berinisiatif untuk membuat zona cagar alam di tanahnya di Depok seluas 6.000 hektar. Para budaknya dilarang untuk menebang pohon di area itu, kecuali untuk kebutuhan pribadi. Zona preservasi hutan yang diciptakan oleh Chastelein merupakan cagar alam pertama yang ada di Indonesia dan terobosan untuk menyelamatkan kondisi Batavia pada abad ke-18. Saat ini cagar alam di Depok sudah mengalami penyusutan karena pembangunan dan modernisasi Kota Depok. Akan tetapi, sebagian kecil cagar alam tersebut masih dapat ditemui dan dijadikan sebagai Taman Hutan Raya oleh Pemerintah Kota Depok (Gambar 5).

Pada akhir hayatnya, Cornelis Chastelein memberikan lahannya yang di Depok kepada para budaknya dan memerdekakan mereka. Hal ini tercatat dalam surat wasiatnya bahwa para budaknya adalah ahli waris yang sah selama mereka menaati perintah Chastelein. Wilayah Depok dijadikan Chastelein sebagai kawasan percontohan *ommenlanden* yang memiliki masyarakat mandiri. Dalam surat wasiatnya, Chastelein menuliskan *Mijn Intentie is dat te Depok mettertijd een Fraaie Christenbevolking groeie* yang berarti ‘Aku berharap agar Depok lambat laun tumbuh menjadi masyarakat Kristen yang mandiri’. Kalimat ini merupakan harapan Chastelein agar para budaknya dapat menjadi masyarakat mandiri sebagaimana tertulis di dalam surat wasiatnya (Chastelein 1900).

Lahan Chastelein di Depok kemudian dikelola oleh para budak dan keturunannya hingga kemerdekaan Indonesia. Bagi para keturunan budak Chastelein atau yang dikenal dengan masyarakat Depok Lama saat ini, Cornelis Chastelein merupakan sosok pahlawan yang memberikan kemerdekaan bagi para budaknya. Dalam salah satu sesi wawancara, narasumber kami menyatakan bahwa Chastelein tidak hanya merupakan seorang tuan tanah, tetapi juga sosok ayah

bagi masyarakat Depok Lama. Ia tidak pernah memanggil budaknya dengan sebutan budak, tetapi selalu menggunakan istilah *mijn volk* atau masyarakatku. Pada saat peringatan ke-300 kematian Chastelein, jemaat Gereja Immanuel, yang anggotanya merupakan keturunan budak Chastelein, menerbitkan sebuah buku tentang perjalanan hidup dan jasa Cornelis Chastelein. Dalam buku ini, Cornelis Chastelein digambarkan sebagai sosok pembebas yang mengangkat derajat para budaknya dan mengajarkan cara hidup yang humanis (Ongirwalu and Jonathans 2014).

Tindakan yang dilakukan oleh Chastelein merupakan salah satu tonggak sejarah yang penting bahwa daerah koloni tidak memperlakukan masyarakatnya dengan persekusi dan penindasan. Salah satu narasumber menyatakan bahwa visi Chastelein dalam membangun Depok melampaui pemikiran para pemegang kekuasaan VOC pada masa tersebut. Tidak hanya dalam konteks perbudakan, Chastelein memiliki peran penting dalam pengelolaan lahan pertanian dan sistem sosial masyarakat. Sebuah museum di Belanda; yang bernama Westfries Museum, pada 2019 menyelenggarakan pameran khusus mengenai jasa Chastelein dalam mengelola lahan perkebunannya di Depok (Gambar 6). Pameran itu diberi nama ‘Depok: *De Droom van Cornelis Chastelein*’ atau Depok: Mimpi Cornelis Chastelein menggambarkan bahwa hasil eksperimen sosial Chastelein di Depok memperlihatkan persamaan hak masyarakat pribumi dan masyarakat Eropa.



Gambar 6. Brosur pameran tentang Depok di Westfries Museum (Sumber: <https://wfm.nl/depok>)





**Gambar 7.** R.M. Jonathans berpose di samping Tugu Cornelis Chastelein tahun 1914  
(Sumber: Koleksi keluarga R.M. Jonathans)

Depok merupakan warisan dari Chastelein dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat yang baik pada masa kolonial.

### **3.3 Kebangkitan dan Kehancuran Tugu Cornelis Chastelein**

Bagi masyarakat Depok Lama, kematian Chastelein merupakan titik nol pembangunan Depok dimulai. Jasa Chastelein terhadap masyarakat Depok Lama selalu dikenang oleh masyarakat Depok Lama, yang kemudian pada tanggal 28 Juni sebagai *Depoksche Dag* (Hari Depok) sejak tahun 1871 (Jonathans 2011). Dalam perayaan ke-200 kematian Chastelein pada 1914, Tugu Cornelis Chastelein dibangun sebagai bentuk penghargaan masyarakat Depok Lama kepada Cornelis Chastelein. Tugu Cornelis Chastelein merupakan prakarsa dari Presiden Depok pada masa itu yang bernama Johannes Mathijs Jonathans (Gambar 7).

Tugu Cornelis Chastelein ini dibangun di depan kantor pemerintahan Depok (*Gemeente Bestuur*) yang saat ini menjadi Rumah Sakit Harapan. Tugu ini berbentuk kubus pada bagian bawah dengan menhir pada bagian atasnya menyerupai lingga dan yoni. Pada bagian bawah tugu terdapat tulisan *ter gedachtenis aan Cornelis Chastelein 28 Juni 1714* yang berarti 'sebagai pengingat Cornelis Chastelein 28 Juni 1714'. Pada sisi sebelahnya terdapat tulisan tentang harapan Chastelein tentang Depok, yaitu *Mijn Intentie is dat te Depok mettertijd een Fraaie Christenbevolking groeie* yang berarti 'Aku berharap agar Depok lambat laun tumbuh menjadi masyarakat kristen yang mandiri'.

Menurut penuturan narasumber, Tugu Cornelis Chastelein menjadi tempat pagelaran perayaan *Depoksche Dag* dengan mengundang warga masyarakat sekitar yang hidupnya berkekurangan sebagai wujud kepedulian Chastelein kepada

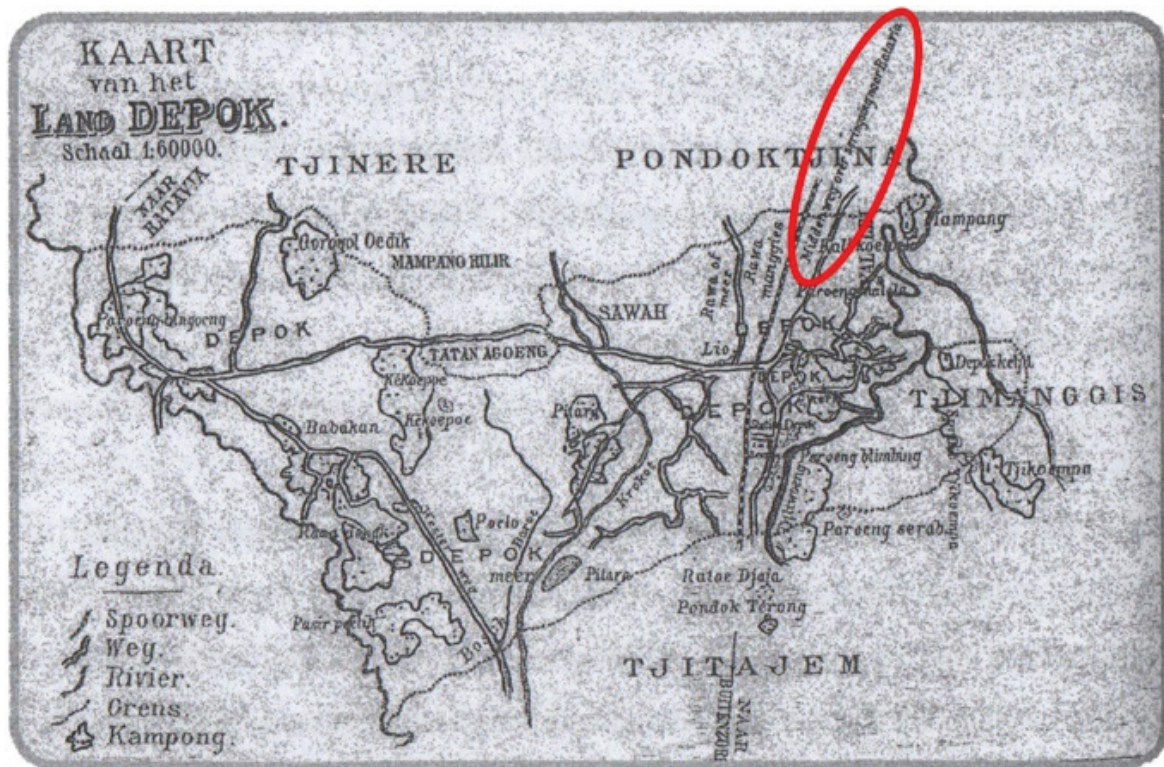
sesama pada masa hidupnya. “Perayaan dengan berbagi kepada sesama merupakan bentuk pengingat ajaran Chastelein kepada kami,” kata salah seorang narasumber.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, wilayah Depok Lama mengalami perubahan yang cukup signifikan. Sesuai dengan Keputusan Pemerintah tanggal 8 April 1949 tentang penghapusan tanah partikelir di seluruh wilayah Indonesia (Jonathans 2011, 234), Depok juga terkena imbas peraturan tersebut. Tanah partikelir di Depok dibeli oleh pemerintah seharga Rp 229.261,26 sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Soerojo tanggal 4 Agustus 1952 (Jonathans 2011, 235). Dalam hal ini, lahan yang selama ini dipergunakan untuk tempat sarana umum, urusan sosial dan keagamaan, diserahkan kepada warga Depok Lama. Untuk mengelola pemanfaatan lahan tersebut, warga Depok Lama mendirikan Yayasan Lembaga Cornelis Chastelein. Selanjutnya, yayasan ini diberi kewenangan untuk mengelola aset publik peninggalan Cornelis Chastelein di daerah Depok.

Sejak daerah Depok Lama menjadi bagian dari Republik Indonesia, proses dekolonisasi

penghapusan memori kolonial berlangsung secara bertahap. Nama jalan yang berada di daerah Depok Lama menggunakan bahasa Belanda dengan mengimbuahkan akhiran *-weg* atau *-straat*, misalnya *Kerkweg*, *Middenweg*, *Pasarstraat*, dan *Grote Passar Weg* (Gambar 8). Dalam perjalanan waktu nama jalan tersebut berubah menjadi nama pahlawan nasional atau peristiwa penting pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia (Wulan *et al.* 2018, 20). *Pasarstraat* dan *Grote Passar Weg*, yaitu jalan di pusat perbelanjaan tradisional di Depok, diubah menjadi Jalan Kartini dan Jalan Dewi Sartika. *Kerkweg*, jalan tempat/lokasi bangunan publik, seperti pusat pemerintahan, gereja, dan sekolah, berubah nama menjadi Jalan Pemuda. Hal itu dimaksudkan untuk memperingati peristiwa perebutan Depok dari tangan *Nederlandsch-Indië Civiele Administratie* (NICA) pada 1947 atau ketika para pemuda Indonesia berjuang mengusir NICA yang bermarkas di Gementee Depok yang terletak di jalan tersebut.

Proses dekolonisasi ini juga berdampak terhadap Tugu Cornelis Chastelein. Pada tahun 1960-an, Tugu Cornelis Chastelein dihancurkan



Gambar 8. Peta Depok yang menampakkan Jalan Middenweg (Sumber: Jonathans 2011, 57)

karena dianggap memiliki memori penjajahan. Namun, alasan penghancuran Tugu Cornelis Chastelein itu belum diketahui secara pasti. Ada beberapa versi tentang proses penghancuran tugu ini. Versi yang pertama adalah karena pada saat itu lahan disekitar tugu tersebut dijadikan markas kepolisian untuk daerah Depok dan menghalangi mobilitas kendaraan. Selain itu, pemanfaatan Gedung Gementee Depok tidak sesuai dengan citra kepolisian yang mengabdikan pada NKRI. Versi lainnya, ketika itu Presiden Soekarno sedang gencar-gencarnya melakukan misi pembebasan Irian Barat (Papua). Banyak monumen dari masa kolonial dihancurkan karena dianggap menggambarkan kekejaman Belanda sebagai bangsa penjajah. Sebagai akibatnya, jejak peninggalan Cornelis Chastelein sebagai tuan tanah di Depok memudar di wilayah tersebut hingga awal tahun 2000-an.

#### **3.4 Perdebatan dalam Pembangunan Kembali Tugu Cornelis Chastelein**

Pada awal tahun 2014 YLCC menginisiasi pembangunan kembali Tugu Cornelis Chastelein. Dalam perencanaan pembangunan ini, tugu tersebut diharapkan dapat diresmikan pada tanggal 28 Juni 2014 yang bertepatan dengan 300 tahun kematian Cornelis Chastelein. Menurut informasi dari narasumber, pembangunan kembali tugu ini tidak hanya dilakukan untuk mengenang jasa Cornelis Chastelein, tetapi juga merupakan penanda awal pembangunan Depok yang dilakukan oleh masyarakatnya sendiri. Pembangunan itu direncanakan oleh YLCC berlokasi di tempat yang sama ketika tugu ini pertama kali dibangun. Lokasi tersebut pada saat itu telah menjadi halaman Rumah Sakit Harapan, bagian dari lahan milik YLCC. Bentuk dan model tugu itu sesuai dengan aslinya berdasarkan hasil riset foto, catatan, dan arsip lama.

Dalam proses pengerjaan pembangunan Tugu Cornelis Chastelein, Pemerintah Kota Depok mengeluarkan larangan melanjutkan pendirian tugu tersebut dengan alasan bahwa

Cornelis Chastelein adalah anggota VOC yang dapat membangkitkan memori penjajahan. Alasan lain karena pada tugu tersebut terdapat tulisan yang mengandung isu agama dan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Depok saat itu yang bisa memicu konflik sosial di tengah masyarakat sebagaimana peristiwa Gedoran Depok pada masa awal kemerdekaan (Tanjung 2014; Ucu 2014). Gedoran Depok merupakan konflik sosial hingga terjadi pertumpahan darah antara masyarakat Depok Lama dan warga sekitar (Wanhar 2011, 97).

Keputusan pelarangan pembangunan kembali Tugu Cornelis Chastelein ramai diperbincangkan di dunia maya. Pro dan kontra muncul di berbagai media sosial hingga beberapa forum daring membuat rubrik khusus terkait dengan hal itu. Tokoh budayawan dan akademisi turut bersuara di media massa, baik cetak maupun digital. Nugraha dan Sunjayadi (2018) menyatakan bahwa pelarangan ini merupakan bentuk diskriminasi dan pengucilan terhadap sejarah masyarakat Depok Lama. Hal ini melanggar asas keberagaman dan pluralitas dalam proses transformasi budaya masyarakat di Kota Depok (Nugraha and Sunjayadi 2018).

Untuk mengatasi polemik yang berkembang, Pemerintah Kota Depok melakukan mediasi dengan pihak YLCC, akademisi, dan tokoh masyarakat untuk mendiskusikan pembangunan Tugu Cornelis Chastelein. Menurut YLCC, meskipun Cornelis Chastelein seorang bangsa penjajah, ia memiliki nilai humanis dan memberikan banyak kontribusi dalam pembentukan Kota Depok dewasa ini. Tugu itu tidak hanya merupakan perwakilan dari kenangan bagi masyarakat Depok Lama, tetapi juga mewakili sejarah pembangunan Kota Depok. Berdasarkan keterangan narasumber yang menghadiri diskusi itu, para akademisi dan tokoh masyarakat yang hadir juga menyetujui pendapat tersebut.

Keputusan dari diskusi adalah pihak YLCC dapat membangun kembali Tugu Cornelis Chastelein dengan sebuah syarat, yaitu

menghilangkan prasasti yang berisikan harapan Chastelein yang tidak sesuai lagi dengan konteks kehidupan masyarakat Depok masa kini. Kesepakatan itu juga untuk menghindari friksi sosial dalam masyarakat Depok (Nugraha dan Sunjayadi 2018).

### 3.5 Dinamika Memori Tugu Cornelis Chastelein

Kontroversi pembangunan kembali Tugu Cornelis Chastelein menghadirkan diskusi yang menarik bagi dunia arkeologi tentang bagaimana memori dari suatu monumen kolonial diperdebatkan oleh masyarakat. Bagi masyarakat Depok Lama, Tugu Cornelis Chastelein merupakan simbol pengingat jasa Chastelein dalam mendidik dan memerdekakan leluhurnya. Di sisi lain, Pemerintah Kota Depok menganggap kehadiran kembali tugu ini sebagai ancaman baru yang dapat mengganggu keamanan sosial masyarakat Kota Depok. Namun, pada akhirnya pembangunan dapat dilanjutkan dengan catatan khusus sebagaimana dikemukakan di atas.

Hal yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dari kasus Tugu Cornelis Chastelein adalah bagaimana tanggapan masyarakat Kota

Depok terkait dengan kehadiran kembali tugu itu. Pada 2019 penulis melakukan kunjungan ke Tugu Cornelis Chastelein di depan Rumah Sakit Harapan Depok dalam rangka observasi lapangan (Gambar 9). Tugu tersebut telah selesai dibangun setinggi 3 m di atas pondasi persegi. Dalam pengecekan di lapangan pada tugu tersebut tidak terdapat tulisan tentang harapan Chastelein sesuai dengan kesepakatan antara YLCC, Pemerintah Kota Depok, akademisi, dan tokoh masyarakat.

Temuan yang menarik pada saat melakukan observasi lapangan adalah tempat publik, seperti restoran dan kafe, terpampang foto Tugu Cornelis Chastelein disertai sejarah dan jasa Chastelein di daerah Depok Lama. Dua lokasi yang secara khusus penulis dalam adalah Jacob Koffie Huis dan Restoran Beranda Depok. Pada saat mengunjungi Jacob Koffie Huis, ruang bagian dalam kafe dihiasi berbagai foto lama tentang Cornelis Chastelein, suasana Depok Lama sebelum kemerdekaan, masyarakat Depok Lama, dan Tugu Cornelis Chastelein. Dari keterangan pemilik kafe diketahui bahwa bangunan kafe merupakan bekas rumah milik keturunan budak Chastelein. Sebagian foto yang menghiasi kafe merupakan dokumentasi pribadi



Gambar 9. Kondisi Tugu Cornelis Chastelein (Sumber: Lukman 2019)

keturunan budak Chastelein. Foto-foto tersebut dipajang untuk memberikan suasana kepada para pengunjungnya bagaimana daerah Depok Lama tempo dulu dan memberikan kesan yang unik kafe itu. Pemilik toko beralasan bahwa, selain memberi nilai jual tambah bagi kafanya, foto-foto ini juga bertujuan untuk mengedukasi para pengunjungnya mengenai sejarah Depok Lama.



**Gambar 10.** Mural Tugu Cornelis Chastelein di Restoran Beranda Depok (Sumber: Lukman 2019)

Restoran Beranda Depok yang terletak tidak jauh dari lokasi Tugu Cornelis Chastelein menghias interiornya dengan mural yang menceritakan sejarah masyarakat Depok Lama. Lukisan dinding ini diawali dengan kedatangan Cornelis Chastelein, pembelian lahan di Depok, kehidupan para budak Chastelein, hingga surat wasiat Chastelein yang menyatakan pembebasan para budak dan pemberian lahannya di Depok. Mural ini ditutup dengan lukisan Tugu Cornelis Chastelein (Gambar 10). Mural ini adalah hasil riset oleh pihak manajemen yang bekerja sama dengan pihak YLCC dan sejarawan. Akan tetapi, disayangkan, tidak ada pihak manajemen yang bersedia diwawancarai dalam kunjungan tersebut. Dalam pemberitaan yang diliput oleh Radar Depok, tema sejarah Depok Lama yang diangkat dalam desain interior restoran ini merupakan langkah pihak manajemen Beranda Depok dalam rangka membangun kesadaran masyarakat Depok tentang peristiwa sejarah yang pernah terjadi di Depok Lama (Abertnego 2017).

Dari hasil pengamatan penulis pada kedua tempat ini, para pengunjung terlihat menikmati foto dan mural tersebut. Pengunjung ada yang menyempatkan diri membaca keterangan atau informasi pada gambar tersebut. Tidak sedikit pula yang mengambil gambar dan membagikannya pada media sosial. Berdasarkan wawancara singkat dengan beberapa pengunjung, kehadiran foto tersebut menggugah ketertarikan mereka dengan riwayat Cornelis Chastelein dan pembentukan Kota Depok. Fakta bahwa Cornelis Chastelein adalah bangsa penjajah tidak terlalu menggusarkan hati para pengunjung. Salah satu pengunjung berkata bahwa Tugu Cornelis Chastelein merupakan saksi sejarah, dan Indonesia sebagai bangsa yang besar wajib menghargai sejarahnya.

Tugu Cornelis Chastelein dan kisah di baliknya dimanfaatkan oleh para pemilik toko sebagai strategi pemasaran barang dagangannya. Hal ini disebabkan oleh kisah Tugu Cornelis Chastelein menarik perhatian masyarakat untuk berkunjung. Hal ini berarti bahwa tinggalan budaya materi memiliki nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf kehidupannya.

Daya tarik riwayat Tugu Cornelis Chastelein juga menciptakan dinamika sosial yang baru bagi masyarakat Depok. Para pengunjung menjadi tertarik untuk mendalami dan mengeksplorasi kisah Cornelis Chastelein dan sejarah Kota Depok. Kehadiran kembali Tugu Cornelis Chastelein memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan masa lalu. Hal ini sejalan dengan pemikiran bahwa tinggalan budaya materi merupakan salah satu penghubung masyarakat masa kini dengan masa lalu (Magetsari 2016, 73). Tugu Cornelis Chastelein memainkan peran yang krusial dalam rangka mengharmonisasi hubungan sosial antar warga masyarakat dan meningkatkan kepercayaan diri individu

karena tinggalan budaya materi dari masa lalu merupakan sumber identitas dan kebanggaan masyarakat sekitarnya.

#### 4. Penutup

Studi kasus tentang Tugu Cornelis Chastelein yang diangkat dalam artikel ini memperlihatkan bahwa monumen kolonial memiliki makna yang selalu berubah dari masa ke masa. Pada awal pendiriannya tahun 1914, tugu ini memiliki makna sebagai simbol terbebasnya masyarakat Depok Lama dari perbudakan dan mengabadikan sosok Cornelis Chastelein sebagai pahlawan daerah tersebut. Tugu ini menjadi monumen pengingat perubahan kehidupan masyarakat Depok Lama.

Setelah kemerdekaan Indonesia, masyarakat yang berada di daerah Depok menganggap tugu ini sebagai aib yang mengingatkan memori penjajahan yang terjadi di Indonesia. Perubahan makna secara drastis terhadap sebuah monument, dari sikap penghormatan menjadi sebuah simbol yang memalukan bagi masyarakat di daerah tersebut. Puncak dari perubahan makna ini adalah tindakan penghancuran Tugu Cornelis Chastelein.

Dengan dilakukannya pembangunan kembali Tugu Cornelis Chastelein, masyarakat di wilayah Depok merasakan adanya perubahan memori mereka tentang Chastelein. Kekhawatiran Pemerintah Kota Depok bahwa pembangunan tugu ini dapat memicu konflik sosial tidak terjadi. Aspek positifnya, warga masyarakat setempat merasakan manfaat pembangunan kembali Tugu Cornelis Chastelein, baik dari segi nilai sosial maupun ekonomi. Melalui kasus disonansi memori pada Tugu Cornelis Chastelein dapat dipelajari bahwa tinggalan materi dapat dikaji lebih jauh dari bagian fisik saja. Nilai ekonomi, sosial, dan politik tinggalan materi juga perlu mendapatkan perhatian khusus dalam penelitian arkeologi karena memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat saat ini.

Arkeologi tidak hanya memiliki fungsi sebagai disiplin ilmu yang membahas kebudayaan masa lalu saja, tetapi juga sebagai bidang ilmu yang dibutuhkan untuk melihat relevansi dari masa lalu untuk memberikan alternatif solusi dalam memecahkan permasalahan yang ada di tengah masyarakat saat ini. Nilai yang dikandung dalam tinggalan budaya masa lalu tidak hanya berguna bagi masyarakat penggunaannya pada masa lalu, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat atau generasi berikutnya.

#### Daftar Pustaka

- Antlöv, H. 2005. "The Social Construction of Power and Authority in Java." *In The Java That Never Was: Academic Theories and Political Practices*, 43–66. New Brunswick: Transaction Publisher.
- Ashworth, G. J., and B. Graham. 2005. *Senses of Place: Senses of Time*. Aldershot: Ashgate.
- Beck, W. and M. Somerville. 2005. "Conversations Between Disciplines: Historical Archaeology and Oral History at Yarrowarra." *World Archaeology* 37 (3): 468–83.
- Candiwidoro, R. R. 2017. "Menuju Masyarakat Urban: Sejarah Pendatang di Kota Jakarta Pasca Kemerdekaan (1949-1970)." *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 4 (1): 57–72. <https://doi.org/10.22146/jps.v4i1.23629>.
- Chastelein, C. 1855. "Invallende Gedagten." *Tijdschrift Voor Indische Taal-, Land, En Volkenkunde* 3.
- . 1876. "Batavia in Het Begin Der Achttiende Eeuw." *Tijdschrift Voor Nederlandsche-Indie* 5.
- . 1900. *Het Testament van Cornelis Chastelein in Leven "raad Ordinaries van India" Overleden Te Batavia Den 28en Juni 1714*. Bataviia: Kho Tjeng Bie.
- Dicks, B. 2003. *Culture on Display: The Production of Contemporary Visitability*. Buckingham: Open University Press.
- Gaztambide-fernández, R. 2014. "Decolonial Options and Artistic/Aesthetic Entanglements : An Interview with Walter Mignolo." *Decolonization: Indigeneity, Education & Society* 3 (1): 196–212.

- Gosden, C. 2012. "Post-Colonial Archaeology." In *Archaeological Theory Today*, edited by I. Hodder, 2 ed, 251–66. Cambridge: Polity Press.
- Irsyam, T. W. M. 2017. *Berkembang dalam Bayang-Bayang Jakarta: Sejarah Depok 1950-1990-an*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Johnson, L. 2014. "Renegotiating Dissonant Heritage: The Statue of J.P. Coen." *International Journal of Heritage Studies* 20 (6): 583–98.
- Johnston, R. and M. Ripmeester. 2007. "A Monument's Work Is Never Done: The Watson Monument, Memory, and Forgetting in a Small Canadian City." *International Journal of Heritage Studies* 13: 117–35.
- Jonathans, Y. 2011. *Depok Tempo Doeloe*. Jakarta: Libri.
- Kanumoyoso, B. 2011. *Beyond the City Wall: Society and Economic Development in the Ommelanden of Batavia, 1684-1740*. Leiden: Universiteit Leiden.
- Kwisthout, J. K. 2018. *De Mardijkers van Tugu En Depok*. Zoetermeer: Lecturium.
- Levine, R. M. and S. B. Meihy. 2001. "Oral History." In *International Encyclopedia of the Social and Behavioral Sciences*, edited by N. J. Smelser and P. B. Baltes, 10891–97. Amsterdam: Elsevier.
- Liebmann, M. and U. Rizvi. 2008. *Archaeology and the Postcolonial Critique*. Lanham: Alta Mira Press.
- Lilley, I. 2000. *Native Title and the Transformation of Archaeology in the Postcolonial World*. Walnut Creek, CA: West Coast Press.
- Lukman, A., G. Assilmi, and I. N. Imandiharja. 2019. "Cultural Heritage Digitization in Indonesia: A New Perspective on Preserving Depok Colonial Heritage." *Kapata Arkeologi* 15 (1), 15-24. <https://doi.org/10.24832/kapata.v15i1.15-24>.
- Lukman, A. and D.A. Nugroho. 2018. "Decolonizing the Colonial History of Depok through Digital Heritage Project." In *The Superdiversity & Coexistence in Our Changing World, 13-14 September 2018, Bangkok*, 1–8. Unpublished work.
- Macdonald, S. 2009. "Unsettling Memories: Intervention and Controversy over Difficult Public Heritage." In *Heritage and Identity*, edited by M. Anico and E. Peralta, 93–104. New York: Routledge.
- Magetsari, N. 2016. *Perspektif Arkeologi Masa Kini dalam Konteks Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Mason, R. and Z. Baveystock. 2009. "What Role Can Digital Heritage Play in the Re-Imagining of National Identities?: England and Its Icons." In *Heritage and Identity*, edited by M. Anico and E. Peralta, 15–28. New York: Routledge.
- Meskell, L. 2012. "The Social Life of Heritage." In *Archaeological Theory Today*, edited by Ian Hodder, 2nd ed., 229–50. Cambridge: Polity Press.
- Metcalfe, J. Z. 2011. "Multiple Histories: The Archaeology, Ethnohistory, Oral History, and National History of Iximché, Guatemala." *Totem: The University of Western Ontario Journal of Anthropology* 13 (1): 61–72.
- Mignolo, W. 2002. "The Geopolitics of Knowledge and the Colonial Difference." *South Atlantic Quarterly* 101 (1): 57–96.
- Moshenska, G. 2007. "Oral History in Historical Archaeology: Excavating Sites of Memory." *Oral History* 35 (1): 91–97.
- Niemeijer, H. E. 2012. *Batavia: Masyarakat Kolonial Abad XVIII*. Jakarta: Masup.
- Nordholt, H. S. 2004. "De-Colonising Indonesian Historiography." In *The Centre for East and South-East Asian Studies Public Lecture Series "Focus Asia" 25-27 May, 2004*, 1–20. Lund.
- Nugraha, F. M. and R. A. Sunjayadi. 2018. "The Transformation of Cultural Values in Depok Society in West Java." In *The 2nd International Conference on Strategic and Global Studies 2018, Jakarta, 24-26 October 2018*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ongirwalu, H. and H. Jonathans. 2014. *Melacak Jejak-Jejak Sang Pembebas: Dari Jemaat Masehi Ke GPIB Jemaat "Immanuel" Depok*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Roosmalen, P.K.M van. 2013. "Confronting Built Heritage: Shifting Perspectives on Colonial Architecture in Indonesia." *ABE*

- Journal 3*. <http://journals.openedition.org/abe/372> .
- Shopes, L. 2002. "Oral History and the Study of Communities: Problems, Paradoxes, and Possibilities." *The Journal of American History* 89 (2): 588–98.
- Smith, L. 2006. *Uses of Heritage*. London: Routledge.
- Tanudirjo, D. A. 2019. "Kuasa Makna." In *Kuasa Makna: Perspektif Baru Dalam Arkeologi Indonesia*, edited by D. A. Tanudirjo, 5–21. Yogyakarta: Departemen Arkeologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada.
- Tunbridge, J. E. and G. J. Ashworth. 1996. *Dissonant Heritage: The Management of the Past as a Resource in Conflict*. Chichester: Wiley.
- Wanhar, W. 2011. *Gedoran Depok : Revolusi Sosial Di Tepi Jakarta 1945-1955*. Jakarta: Usaha Penerbitan Telahsadar.
- Whiteley, P. M. 2002. "Archaeology and Oral Tradition : The Scientific Importance of Dialogue." *American Antiquity* 67 (3): 405–15.
- Wulan, P. P. D. K., A. Lukman, D.A. Nugroho, M. Jazmi, I. N. Imandiharja, K. N. A. Rosadi, F. Afifah, and M. S. Danurrahman. 2018. *Digitalisasi Depok Lama: Sejarah, Peristiwa, Dan Tinggalan Materinya*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Yamin, M. 2008. *Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Sumber Online**
- Abertnego, I. 2017. "Nongkrong Sambil Mendapatkan Edukasi Sejarah." *Radar Depok*, October 2017. Accessed January 2, 2020 <https://radardepok.com/2017/10/nongkrong-sambil-mendapatkan-edukasi-sejarah/>.
- Tanjung, A. 2014. "5 Kisah Tugu Cornelis Chastelein Haram Berdiri di Depok." *Merdeka*, September 9, 2014. <https://www.merdeka.com/peristiwa/5-kisah-tugu-cornelis-chastelein-haram-berdiri-di-depok.html>.
- Ucu, K. R. 2014. "Depok Larang Pembangunan Tugu Cornelis Chastelein." *Republika*, September 11, 2014. <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/14/09/11/nbqec1-depok-larang-pembangunan-tugu-cornelis-chastelein>.